

EFEKTIFITAS PENGUKURAN LIKUIDITAS TERHADAP KESEHATAN PERUSAHAAN PT. X DI MERAUKE

Enggar Trijunanto

Pengaruh Praktik *Corporate Governance*, Intensitas asset tetap, intensitass persediaan dan profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016"

Ignatius Ari

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR STASIUN METEOROLOGI MOPAH KABUPATEN MERAUKE

Yohana Fatruan

ANALISA RASIO DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERUSAHAAN X DI MERAUKE

Metodius France Marjun Janggur, SE.,M.AK

Yulia Samanin Gebse

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MERAUKE

Emilya Yunita Korisien

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung	:	Badan Pengurus Yayasan LPK Saint Theresa
Penanggung jawab	:	Yohanes Ngamal, SE.,M.M
Dewan Redaksi	:	
Ketua	:	Hendrik. Pandiangan, S.Kom., M.M
Wakil ketua	:	Inez Cara A. Phoek, B.Com.,M.M
Anggota	:	Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,M.M Fransiscus. Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501

Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

4

Daftar Isi

EFEKTIFITAS PENGUKURAN LIKUIDITAS
TERHADAP KESEHATAN PERUSAHAAN PT. X
DI MERAUKE
Enggar Trijunanto

5

11

PENGARUH PRAKTIK *CORPORATE
GOVERNANCE*, INTENSITAS ASSET
TETAP, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN
PROFITABILITAS TERHADAP *EFFECTIVE TAX
RATE (ETR)* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016"
Ignatius Ari

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR STASIUN
METEOROLOGI MOPAH KABUPATEN MERAUKE
Yohana Fatruan

53

75

ANALISA RASIO DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN PERUSAHAAN X DI MERAUKE
Metodius France Marjun Janggur, SE.,M.AK
Yulia Samanin Gebse

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN
TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN MERAUKE
Emilya Yunita Korisien

89

Pengaruh Praktik *Corporate Governance*, Intensitas asset tetap, intensitas persediaan dan profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016”

Ignatius Ari

PENELITIAN ini bertujuan untuk secara empiris pengaruh **Pengaruh Praktik *Corporate Governance*, Intensitas asset tetap, Intensitas persediaan dan profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek**. Dalam penelitian ini variabel dependennys adalah Effective tax rate (ETR). Effective tax rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan. Sedangkan Variabel independen dalam penelitian ini adalah Independen adalah Karakteristik Corporate Governance, Intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan profitabilitas. Variabel Kontrol dalam Variabel Independen Karakteristik Corporate Governanace terdiri dari: komisaris Independen, komite audit dan investor institusional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen (IND) tidak berpengaruh terhadap *effective Tax Rate*. Namun ditemukan adanya kecenderungan bahwa semakin banyak yang menduduki jabatan komisaris independen, semakin tinggi pula *Effective Tax Rate*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

yang dilakukan oleh Vicky Amelia (2015) dan Hanum Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa “komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective Tax Rate* perusahaan”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit (CA) tidak berpengaruh terhadap *effective Tax Rate*, investor institusional (II) tidak berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Efeective Tax Rate* (ETR), Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara negative terhadap *Effective Tax Rate*, Intensitas pesediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate*. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *effective Tax Rate*, dengan demikian hipotesis dari penelitian variabel ditolak, hasil ini dapat dilihat dari nilai signifikasinya yang melebihi 5%. Beberapa penelitian lain yang memiliki kesamaan yaitu salah satunya Ardyansyah dan Zulaikha (2014) yang menghasilkan bahwa hipotesis profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* dimana hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah.

Kata Kunci: Corporate Governance, Intensitas asset tetap, intensitas persediaan dan profitabilitas terhadap Effective Tax Rate (ETR)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan bisnis dan industri di Indonesia mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dimana pada tahun 2008 melakukan sebuah kebijakan dalam merevisi undang-undang didalam bidang perpajakan dengan cara membuat dan mensahkan beberapa pasal Undang-Undang untuk berlaku mulai 1 Januari 2009. Revisi yang dimaksudkan oleh Nasution (2009) adalah "undang-undang ketentuan dan tata cara perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN & PPh BM)". Revisi tersebut dimasukan dalam kategori Reformasi terhadap bidang Perpajakan di Indonesia.

Peraturan perpajakan mempengaruhi perkembangan dunia bisnis dalam setiap Negara. Bagi mereka berkembang pajak merupakan unsur yang paling penting dalam menyanggah anggaran penerimaan Negara, termasuk di Indonesia pajak merupakan sumber penghasilan Negara yang secara signifikan dapat memenuhi anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Bagi perusahaan, pajak menjadi hal yang paling dihindari karena dapat mengurangi Laba bersih perusahaan sehingga merugikan bagi keuangan perusahaan.

Untuk mendorong dan meningkatkan pendapatan perusahaan agar tidak menjadikan pajak sebagai beban yang harus dihindari, maka pemerintah melalui kementerian keuangan beserta Direktorat Jendral Pajak memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan didalam undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2 (b) dan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan pajak.

System pengenaan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan *Self Assessment System* yang berarti pemerintah memberikan keleluasaan bagi para Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem tersebut dapat juga membuka kesempatan yang luas bagi Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah-rendahnya serta beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih sedikit (Ardiansyah dan Zulalkha 2014).

Proses membayar pajak serendah-rendahnya dapat dilakukan dengan Manajemen Pajak (*Tax Management*), melalui rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak meminimalkan hutang pajak tetapi masih dalam zona perpajakan yang berlaku. Tetapi manajemen pajak dapat juga berkonotasi positif sebagai perencanaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar, tepat akurat dan lengkap sehingga menghindari borosnya pemakaian sumber daya wajib Pajak secara Optimal. Usaha dan strategi yang dilakukan dalam manajemen pajak dapat meliputi fungsi perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendali kewajiban perpajakan. Strategi-strategi tersebut dilakukan lebih detail dalam memanfaatkan celah-celah (*Loop-holes*) atau sering disebut juga *grey-areas* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila ada yang menyalahi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku bias diindikasikan mengarah kepada penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam memaksimalkan penerimaan Negara dalam bidang pajak pemerintah secara rutin melakukan reformasi perpajakan dalam hal tarif dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang dikenakan kepada setiap Wajib Pajak di Indonesia. Abimanyu (2003) mengatakan bahwa "Reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang mempunyai tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada administrasi perpajakan yang kuat dan produktif aparat perpajakan yang tinggi". Reformasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah agar sistem perpajakan

dapat berjalan lebih efektif serta efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi. Kemudian salah satu alasan lain pemerintah dalam melakukan Reformasi pajak adalah untuk menstabilkan pendapatan dari sektor perpajakan dalam menghadapi krisis global sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional. Melalui UU No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 28% di Tahun pajak 2009 dan 25% di tahun pajak 2010. Wajib pajak sebagai pelaku usaha akan mendapatkan tambahan potongan 5% jika WP tersebut merupakan WP badan dalam negeri yang terbentuk Perseroan Terbuka (PT) dengan beserta kepemilikan lebih dari 40% didalam list BEI dan saham tersebut dibagi kepada paling kecil 300 pihak.

Penurunan tarif yang terjadi setelah reformasi dipercaya dapat menguntungkan perusahaan sehingga penerimaan dari perusahaan akan disignifikan meningkat. Peraturan perpajakan yang membuat wajib pajak kewalahan dalam membayarnya akan berdampak buruk bagi kegiatan usaha dan memungkinkan penghasilan laba yang kecil sehingga akibatnya adalah akan mengurangi juga pendapatan Negara dari sector pajak. Hal tersebut dapat berarti pajak dapat mempengaruhi *Capital Budgeting* melalui *tax effect* dalam menentukan aliran kas, pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam merencanakan system kompensasi manajemen (Blocher et al, 1999).

Berbagai cara wajib pajak badan dalam mengurangi beban pajak yang dihasilkan dengan berbagai cara. Berbagai kebijakan diambil oleh wajib pajak badan dalam meminimalisasi kewajiban perpajakannya serta memilih metode pembukuannya sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) merupakan *tax planning* yang efektif dan efisien. Karayan dan Swenson (2007) menyatakan "salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengolah pajaknya adalah dengan melihat *tariff efektifnya*". Liangsheng et al (2007) menyatakan "nilai *Effective Tax Rate* merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang di hitung dalam sebuah perusahaan,

oleh karena itu keberadaan *effective Tax Rate* kemudian menjaddi perhatian khusus bagi berbagai penelitian karena dapat mengumpulkan efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan".

Kebijakan penurunan pajak dapat mengurangi juga jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan, tetapi menurunnya tarif tersebut bisa disebut sebagai tarif yang adil dan tidak akan ada yang merasa dirugikan baik itu pihak direktorat jendral pajak maupun pihak perusahaan. Banyak hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Gupta dan Newberry (1997) mengatakan "melalui perbedaan karakteristik dapat menimbulkan suatu keraguan mengenai apakah peraturan atau kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah telah memberikan ruang leluasa untuk perusahaan untuk melakukan permainan pajak".

Selama rentang waktu 5 tahun terakhir jumlah penerimaan pajak terus mengalami perubahan baik naik dan turun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak pada Tahun 2013 mencapai 1.077 milyar dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 hingga 1.539 milyar. Meskipun dalam realisasi angka dalam penerimaan pajak mengalami peningkatan dan adanya kebijakan baru di tahun 2016 yaitu *Tax Amnesty* membuat peningkatan disektor penerimaan pajak, namun dalam pencapaiannya APBN setiap tahunnya tidak tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang (Waluyo dan Basri, 2015).

Kurangnya sadar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara terlalu besar sehingga setiap wajib pajak dalam hal ini khususnya wajib pajak badan melakukan berbagai perencanaan pajak (*Tax planning*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoiding*). Tarif pajak efektif adalah presentasi tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo:2013,17). Asumsi lain mengatakan *effective Tax Rate* adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib

pajak. Penghasilan disini merupakan penghasilan kotor atau penghasilan kena pajak, tergantung kepada kebutuhan atau dari segimana seseorang ingin melihat beban tarifnya.

Ardiansyah (2014) mengatakan "*effective tax rate (ETR)* sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem pajak dan perusahaan". Didalam perusahaan biasanya akan memperdebatkan pemakaian tarif pajak normal dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* "*effective tax rate (ETR)* berbeda dengan tarif pajak yang berlaku umum. *Effective tax rate (ETR)* digunakan sebagai pengukuran pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku umum menunjukkan jumlah kewajiban pajak relative terhadap penghasilan kena pajak (PKP)".

Efektif tidaknya perusahaan mengefisiensi beban pajaknya dapat dilihat dengan melihat tarif pajak efektif (*ETR*). Pada dasarnya *ETR* merupakan perbandingan antara kewajiban perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan perpajakan, dengan laba akuntansi berdasar pada standar akuntansi. *ETR* dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Efektif dan tidaknya kewajiban perpajakan sebuah perusahaan relative terhadap laba komersialnya dilihat melalui *ETR*. Oleh karena itu untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *ETR* merupakan hal penting dan perlu diperhatikan dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi *ETR* yaitu Karakteristik *Corporate Governance*, intensitas asset tetap & persediaan, serta profitabilitas. Dan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi *Effective Tax Rate (ETR)*.

Perusahaan pemerintah yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mayoritas adalah pemegang saham ditangan pemerintah, oleh sebab itu pemerintah diharapkan untuk memantau perkembangan kegiatan usahanya. Pemegang saham

diharapkan memiliki andil besar dalam menentukan *effective tax rate (ETR)* perusahaan, didalam instansi pemerintah diindikasikan adanya perbedaan pendapat dalam menentukan *effective tax rate (ETR)* baik dalam manajemen maupun oleh pemegang saham mayoritas.

Karakteristik *corporate Governance (CG)* adalah suatu kewajiban perusahaan-perusahaan yang sahamnya sudah listing di Bursa Efek Indonesia, sebagai perusahaan yang sahamnya telah listing di Bursa Efek Indonesia, maka juga memiliki kewajiban untuk menjalankan perusahaan dengan baik agar dapat dijadikan contoh oleh masyarakat, bangsa dan Negara serta bagi perusahaan lain. Agoes dan Ardana (2009) menyatakan "*corporate Governance* pada umumnya merupakan suatu system yang mengatur hubungan Dewan Komisaris, Peran Dewan Direksi, Pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya". Beberapa tahun ini *Corporate Governance* merupakan tolak ukur pemegang saham dalam memantau kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menjalankan perusahaan dan dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya. *Corporate Governance* dalam perusahaan memiliki tujuan agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena dapat memberi perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan stakeholder. Kinerja perusahaan dapat dinilai baik apabila laba yang diperoleh perusahaan juga maksimal dan dapat berkelanjutan (*Sustainable Earnings*) diperiode selanjutnya.

Tingkat profitabilitas yang maksimal didapatkan oleh perusahaan berbanding lurus dengan tariff pajak yang tinggi akan dikenakan kepada perusahaan. Menurut UU No.36 Tahun 2008 menjelaskan tentang "penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan akan dikenakan pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima akan menghasilkan semakin besar juga pajak yang akan dikenakan pada perusahaan". Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Roman (2007) menemukan bahwa "profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*".

Menurut penelitian Noor et al, 2010 menemukan bahwa "besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan, hal itu disebabkan karena perusahaan dengan efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang rendah. Beban pajak yang rendah karena perusahaan berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak yang lain yang dapat menyebabkan *effective tax rate (ETR)* perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya".

Intensitas kepemilikan aset tetap mempengaruhi pajak perusahaan karena ada beban depresiasi yang melekat kepada aset tetap tersebut. Blocher et al, 2007 mengatakan beban depresiasi menjadi pengurangan terhadap pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut penelitian Ardiansyah dan Zulaikha (2004) menemukan bahwa "perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi juga, karena beberapa perusahaan yang punya aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak jika dibawa pulang oleh penggunaannya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%. Perlakuan terhadap biaya penyusutan aset tetap dapat mempengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan".

Intensitas persediaan mengakibatkan biaya yang besar dan dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Menurut PSAK No 14 (IAI, 2017) menjelaskan "jumlah pemborosan, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui oleh beban dalam periode terjadinya biaya". Penelitian atas intensitas persediaan yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Noor et al, 2010, dan chiao et al (2012) menemukan "bahwa intensitas persediaan berakibat pada bertambahnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Jumlah pajak yang dibayar perusahaan akan meningkat dikarenakan tidak ada faktor mengurangi pajak didalam kepemilikan persediaan".

Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Amelia

(2015) dengan mengurangi variabel independen Leverage tetapi menambah Variabel independen yang lain yaitu karakteristik *Corporate Governance* dalam pengaruhnya terhadap *effective tax rate (ETR)*. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan kriteria perusahaan manufaktur secara umum dan secara khusus menggunakan sampel perusahaan manufaktur secara umum dan secara khusus menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang termasuk didalam sector *Industry barang konsumsi*, karena perusahaan yang bergerak diindustri barang konsumsi beberapa hari ini emiten sahamnya bergerak terus secara positif didalam pasar saham. Sehingga bertumbuhnya sektor tersebut dapat berdampak juga terhadap peningkatan pendapatan perusahaan, dengan meningkatnya pendapatan tersebut meningkat juga beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan kajian-kajian diatas serta melihat kebijakan pemerintah yang semakin ketat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada maka peneliti akan melakukan penelitian tentang "**Pengaruh Praktik Corporate Governance, Intensitas aset tetap, Intensitas persediaan dan profitabilitas terhadap Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa factor-faktor yang berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*. Hal-hal tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah praktik *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*?
3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*?

1.3 Tujuan Penelitian

adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh praktik Corporate Governance berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas asset tetap berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate (ETR)*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan adanya berbagai kontribusi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kontribusi Teoritis
 - Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu tambahan dan sebagai tambahan dan sebagai acuan dalam mengembangkan teori lain.
 - Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang akuntansi yang bermanfaat.
 - Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai judul ini
- b. Kontribusi Praktis
 - Bagi pembuat kebijakan dalam perpajakan agar dapat lebih bijaksana lagi dalam merancang peraturan perundang-undangan tidak hanya menguntungkan atau merugikan sebelah pihak.
 - Bagi perusahaan agar penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan yang belum memiliki system Corporate Governance agar dapat menjalankannya dan dapat berpartisipasi penuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam sector perpajakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami Corporate Governance. Teori

keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota didalam perusahaan. Teori keagenan tersebut dikembangkan oleh Michael Johnson yaitu profesor dari Universitas Harvard yang memandang bahwa "manajemen perusahaan akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai seseorang yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham". Menurut Jansen dan Meckling (1976) "hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agent membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Jika ternyata kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama dalam memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agent akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal".

Yang disebut dengan Principal adalah pemegang saham atau investor, kemudian yang dimaksud sebagai agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Menurut Eisenhardt dalam Bayu (2010) "teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu pada umumnya mementingkan dirinya sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari (risk averse)". Haris (2004) menyatakan "berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut tersebut, manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Pihak agent termotivasi untuk memaksimalkan *fee kontraktual* yang diterima sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Sebaliknya, pihak principal termotivasi untuk mengadakan kontrak atau memaksimalkan return dari sumber daya untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Konflik kepentingan ini terus meningkat karena pihak principal tidak dapat memonitor aktifitas agent tiap hari untuk memastikan bahwa agent bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, agent sendiri mempunyai banyak sekali informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang dapat

memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara principal dengan agent, kondisi tersebut dinamakan Asimetri Informasi.

Ujianto (2007) menyatakan "hak pengendalian yang dimiliki oleh manajer memungkinkan untuk diselewengkan dan dapat menimbulkan masalah keagenan yang diartikan sebagai sulitnya investor yang memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer. Manajer memiliki wewenang untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor". Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan propek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham).

Dalam penelitiannya Ardyansyah dan Zulaikha (2014) menjabarkan "perbedaan kepentingan antara principal dengan agent dapat mempengaruhi banyak hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya kebijakan perusahaan mengenai sektor pajak. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah menggunakan *self assessment system* yang berarti wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agent untuk menghitung penghasilan kena pajak seminimal mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung oleh pihak agent karena adanya asimetris informasi terhadap pihak principal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agent akan memperoleh keuntungan sendiri yang tidak bias didapatkan dari kerjasama dengan pihak principal".

Menurut Copeland dan Weston (2010) "Teori keagenan menyatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (principal), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham". *Shareholder atau principal* mempekerjakan agent untuk melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam lingkungan yang tidak pasti yaitu pada saat perusahaan dalam kondisi *financial*

distress. Agent sebagai seorang manager akan mengambil keputusan untuk berbagai perencanaan guna bertahan demi kelangsungan hidup usaha perusahaan.

Konflik kepentingan antara principal dengan agent memerlukan ada lagi satu pihak yang menengahi permasalahan antar pihak tersebut yaitu pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan. Aktivitas masing-masing pihak dapat dinilai dari kinerja keuangannya yang dapat kita lihat dari laporan keuangannya. Dalam teori keagenan pemilik perusahaan akan membutuhkan pihak auditor untuk memastikan informasi yang diberikan manajemen kepada pihak pemegang saham sesuai dengan kenyataannya. Sebaliknya, manajemen membutuhkan pihak auditor untuk memberikan penilaian atas kinerja yang mereka lakukan biasanya dalam bentuk laporan keuangan, sehingga hasil dari audit yang dilakukan dari pihak auditor bias dipakai oleh manajemen untuk memberikan insentif kerja bagi pihak yang menjalankan perusahaan tersebut dengan baik. Pihak kreditor pun membutuhkan juga pihak auditor untuk lebih memastikan lagi bahwa dana yang akan mereka tanam didalam saham perusahaan benar-benar digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan persetujuan yang ada sehingga hasil keuntungan perusahaan tersebut dapat dirasakan oleh kreditor.

Pengawasan tersebut dipastikan akan mengeluarkan biaya yang tidak kecil atau biasa disebut *monitoring cost* (Jansen dan Meckling, 1976). Biaya pengawasan tersebut digunakan untuk mengawasi kegiatan dari agent, apakah benar adanya pihak agent melakukan tindak yang sesuai dengan kepentingan principal melalui laporan yang akurat atas semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer. Atas uraian tersebut maka auditor dianggap sebagai pihak yang menjembatani kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006), termasuk menilai kelayakan strategi dari pihak manajemen dalam mengupayakan untuk mengatasi kesulitan keuangan perusahaan. Menurut pendekatan audit *topdown holistic*, auditor memiliki

kewajiban mengevaluasi resiko bisnis milik klien (Boyton, 2002). Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* memiliki resiko bisnis yang lebih besar. Oleh karena itu, auditor akan melihat kembali apa rencana serta tindakan strategik yang telah dilakukan oleh manajemen apalagi rencana manajemen yang terlalu optimis (Hackenbrack dan Nelson, 1996).

Masdupi (2005) mengemukakan tentang penelitiannya yaitu tentang "beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah keagenan. Pertama, dengan meningkatkan *insider ownership*. Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kedua, dengan pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Akan tetapi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik.

Selain itu penggunaan hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan konflik keagenan antara *shareholders* dengan *debtholders* sehingga memunculkan biaya keagenan hutang". Ketiga, *institutional investor* sebagai *monitoring agent*. Moh'd et al, (1998) menyatakan bahwa "bentuk distribusi saham dari luar (*outside shareholders*) yaitu *institutional investor* dan *shareholders dispersion* dapat mengurangi biaya keagenan ekuitas (*agency cost*)".

Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menantang keberadaan manajemen, maka konsentrasi atau penyebaran *power* menjadi suatu hal yang relevan dalam perusahaan".

2.2 Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang

dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menjalankan pemerintahan. Seligman (1925) menyatakan bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang.

Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak yang dikutip dari buku yang ditulis oleh brotodiharjo (2008) dengan Judul Bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, diantaranya :

1. **Prof. Dr. P. J. A andriani** menyatakan bahwa "*pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah*".
2. Sedangkan pengertian pajak menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH**, dalam bukunya "Dasar – dasar hukum pajak dan pajak pendapatan" (1990:5) "**Pajak** adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
3. Menurut **Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.** " pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan preposisional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. Pengertian pajak menurut **Undang – Undang No.**

28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan **pasal 1** menyebutkan : "*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Dari beberapa pengertian ilmiah tentang pajak dapat disimpulkan bahwa pajak di Indonesia memiliki ciri-ciri yaitu pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya sifatnya dapat dipaksakan, dalam hal pembayarannya pajak tidak dapat menunjukkan adanya timbal balik secara langsung kepada individual yang telah membayarnya oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak yang telah terkumpul digunakan sebaik-baiknya bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan yang apabila pemasukan tersebut ternyata surplus maka sisanya dapat dipergunakan sebagai biaya *public investment*, pajak juga dapat berfungsi sebagai pengatur.

Fungsi pajak adalah manfaat pokok pajak, sebagai alat untuk menentukan jalur politik prekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan pengertian pajaknya yang dikutip dari Buku yang ditulis oleh Brotodiharjo (2008) dengan Judul Bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgeter* seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Ilyas (2003) dalam bukunya perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa: "pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah". Fungsi *budgeter* seperti yang ditulis oleh Siti resmi dalam bukunya perpajakan teori dan kasus, menyatakan bahwa : "pajak mempunyai fungsi *budgeter* artinya pajak merupakan

salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain". Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi budgeter yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* seperti yang ditulis Waluyo dan Ilyas (2003) berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. "fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa "Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, selain pajak dimaksudkan pula sebagai pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta." Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi *regulerend* yaitu sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta untuk mengubah susunan pendapatan dalam sektor pemerintah.

2.3 Effective Tax Rate

menurut Richard dan Lanis (2007) "tariff pajak efektif (effective tax rate) adalah perbandingan nominal pajak riil yang dibayarkan dengan laba komersial sebelum pajak". Effective tax rate (ETR) berguna bagi perusahaan dalam menghitung presentase beban pajak yang akan dikenakan terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Melalui effective tax rate

(ETR) perusahaan juga dapat membandingkan beban pajak akan dikenakan lebih besar ataupun lebih kecil dari tarif pajak komersial sebelum pajak yang dihitung secara akuntansi. Menurut Haryadi (2012) "effective tax rate (ETR) menjadi ukuran penting bagi beban pajak bagi para pembuat kebijakan untuk jenis usaha tertentu dalam pemberian insentif kepada wajib pajak".

Effective tax rate (ETR) bermanfaat untuk perusahaan dalam mengetahui sejauh mana perusahaan tersebut mengatur sistem perpajakan yang berlaku. Sickney dan McGee dalam Haryadi (2012) menyatakan bahwa "bila perusahaan memiliki presentase Effective Tax Rate (ETR) yang lebih besar dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada sehingga dapat memperkecil presentase pembayaran pajak dari laba komersial. Effective Tax Rate (ETR) sering dijadikan bahan oleh pembuat keputusan dan pihak yang berkepentingan sebagai alat dalam membuat kesimpulan mengenai sistem perpajakan".

Fullerton (1984) dan Anunjal (2011) mengklasifikasikan Effective Tax Rate (ETR) dalam empat jenis yaitu :

- Average Effective Corporate Tax Rate : biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).
- Average Effective total tax rate : besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak property ditambah bunga atas apajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan modal.
- Marginal effective corporate tax wedge : besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak marginal effective corporate tax rate : pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (tax-inclusive rate) atau dengan penghasilan setelah pajak (tax exclusive rate).
- Marginal effective total tax wedge : penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan. Marginal effective total tax rate : total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (tax-inclusive

rate) atau dengan penghematan pajak penghasilan (tax-exclusive rate) yang dilakukan perusahaan.

2.4 Corporate Governance

2.4.1 Pengertian Corporate Governance

Menurut Agoes dan Ardana (2009) "corporate governance ternyata tidak memiliki suatu definisi tunggal. Banyak yang menafsirkan definisi corporate governance kedalam pemahaman masing-masing namun masih dalam batasan yang cukup wajar. Corporate governance menurut Indonesian Institute for Corporate Governance adalah suatu struktur, system, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Corporate governance dapat berarti sebagai tata kelola yang baik dimana terdapat suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya". Tata kelola perusahaan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila adanya keterbukaan proses penentuan tujuan usaha, metode pencapaiannya, menilai kinerja perusahaan. Corporate governance adalah hubungan yang erat antara penggerak perusahaan dengan stakeholder baik itu pemegang saham ataupun pihak lain yang bersangkutan dengan kelangsungan perusahaan tersebut. Komite Cadbury tahun 1992 melalui Cadbury report mengeluarkan suatu definisi dari corporate governance yaitu "suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapainya keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para stakeholder khususnya". Penerapan corporate governance sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk badan usaha milik negara (BUMN). Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-177/M-MBU/2020 pasal 1 tentang praktik corporate governance pada badan usaha milik negara (BUMN) menjelaskan bahwa "corporate governance adalah : suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya serta berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Irgan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), komisaris, dan direksi, sedangkan stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung. Corporate governance didefinisikan sebagai struktur karena corporate governance berperan dalam mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan stakeholders lainnya. Sementara sebagai sebuah proses, corporate governance memastikan transparansi serta proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya*.

2.4.2 Prinsip Corporate governance

Corporate governance adalah system pengelolaan perusahaan yang dilakukan dengan baik dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut Solihin (2009) dan Waryanto (2010) "Tujuan lain dari adalah corporate governance untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku". Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka perusahaan harus dapat secara tegas dan giat menerapkan corporate governance. Organization for economic cooperation and development dalam (Surya dan Yustianandana, 2006) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip corporate governance adalah sebagai berikut :

1. Fairness (kewajaran)
Perusahaan harus memberikan kedudukan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminasi dapat dicegah sedini mungkin. Dalam hal ini, terutama kepada pemegang saham minoritas.
2. Disclosure/transparency (keterbukaan/transparansi)
Pengungkapan informasi mengenai perusahaan harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

Selain itu, perusahaan harus menunjukkan adanya transparansi informasi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para stakeholder.

3. Accountability (akuntabilitas)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan para stakeholders.
4. Responsibility (responsibilitas)
Perusahaan harus mematuhi peraturan-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang sehingga perusahaan dapat memperoleh nama baik.
5. Independency (independensi)
Kegiatan usaha sebuah perusahaan harus berjalan secara independen tanpa ada campur tangan pihak lain, sehingga masing-masing penggerak perusahaan tidak saling mendominasi.

2.4.3 Praktik Corporate Governance

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Andayani (2010) "Karakteristik corporate governance terbagi dalam dua bagian yaitu internal governance dan external governance". Menurut Bambang dan Rosestein (1998) dalam Andayani (2010) "Bagian yang terdapat di dalam Internal governance adalah Struktur Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif. Sedangkan di dalam External Governance terdiri dari Institusional Ownership, Pasar dan Tingkat Pendanaan dengan hutang (debt financing)". Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEI/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang

Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat wajib memiliki tatanan Karakteristik Corporate Governance sebagai berikut:

1. Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali

dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.

2. Komite audit dimana anggotanya minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
3. Sekretaris perusahaan.

2.4.3.1 Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan corporate governance karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip corporate governance, khususnya mengenal perlindungan terhadap investor. Untuk mendorong implementasi corporate governance, dibentuk sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. "Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan corporate governance di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia" (Surya dan Yustia Vandana, 2006). Organ-organ tambahan tersebut antara lain adalah komisaris independen dan komite audit. Surya dan Yustia Vandana (2006) menjelaskan bahwa "komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat terjadinya keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder-nya". Keberadaan komisaris independen berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEI/07-2004 "mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris". Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang "pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.15" adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki saham secara

langsung maupun tidak langsung emiten atau perusahaan publik;

2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama perusahaan publik;
3. Komisaris Independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.4.3.2 Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari minimal 3 orang yang terdiri dari Komisaris Independen diisi oleh 2 orang luar perusahaan yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk:

- (i) Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- (ii) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- (iii) Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit.
- (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris / Dewan Pengawas.

Wewenang Komite Audit dibatasi oleh tugas mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris), kecuali untuk beberapa hal tertentu yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit akan dituangkan dalam Charter Komite Audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu financial reporting, Corporate governance, dan risk and

control management.

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006) "keberadaan Komite Audit dituntut untuk bertindak secara independen karena bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara eksternal auditor dengan perusahaan serta menghubungkan antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan internal auditor". Hasnati (2003) dalam Surya dan Yustiavandana (2006) mengatakan bahwa "Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris".

2.4.3.3 Investor Institusional

Husnan (2001) menegaskan bahwa "ada dua jenis ownership dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan sangat menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi". "Perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen" (Goldberg dan Idson, 1995) dalam Husnan (2001). "Jenis kepemilikan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling dan minority shareholders" (Asian Development Bank, 2000) dalam Husnan (2001). "Controlling shareholders dapat bertindak sejalan dengan kepentingan pemegang saham lainnya atau bertentangan. Controlling shareholders mempunyai informasi yang lebih lengkap daripada minority shareholders sehingga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan" (The Business Roundtable, 1997) dalam Wulandari (2006). Pada kasus kepemilikan ini, kemungkinan muncul permasalahan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas cenderung terlibat dalam pengendalian perusahaan dan cenderung bertindak berdasarkan kehendak maupun kepentingan mereka sendiri dan terkadang mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas. Karakteristik kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi pada institusi banyak di jumpai untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia (Husnan, 2001) dan (Gunarsih, 2003). Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan

publik yang berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseroan atau pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik maupun perseroan terbatas multinasional. Kelemahan dalam kepemilikan yang terkonsentrasi pada institusi disampaikan oleh Shleifer dan Vishny (1997) adalah kepemilikan dalam jumlah besar dapat mendahulukan kepentingan mereka sendiri yang mungkin sekali bertentangan dengan pemilik lainnya. Hasil pengujian empiris yang dilakukan oleh Gunarsih (2003) adalah kepemilikan institusi domestik mempengaruhi pengelolaan (governance) perusahaan dan semakin tinggi proporsi kepemilikan institusi domestik maka semakin rendah kinerja perusahaan. Belner et al., (2003) dan Shleider & Vishny (1997) menegaskan bahwa untuk memperbaiki corporate governance yaitu dengan meyakinkan bahwa perusahaan memiliki satu atau lebih pemegang saham besar. Belner et al., (2003) menjelaskan bahwa pemegang saham yang jumlahnya cukup besar (large shareholder) menggunakan kekuatan suara mereka untuk memperbaiki posisi mereka sendiri dari pada pemegang saham lainnya.

2.5 Intensitas Aset Tetap

Martani et al. (2012) menyatakan "Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. Definisi aset tetap adalah aset berwujud yang: a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi b. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Martani et al., (2012) menjelaskan bahwa "aset tetap suatu entitas memiliki masa manfaat lebih dari satu periode dan seiring dengan pemakaian aset tetap tersebut maka kemampuan potensial aset tetap tersebut untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang". "Oleh karena itu, biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan sepanjang umur dari aset tersebut secara sistematis. Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai secara sistematis selama periode manfaat dari aset

tersebut" (Martani et al, 2012). "Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak. Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil" (Blocher et al, 2007).

2.6 Intensitas Persediaan

Menurut Agoes (2013:54) "Usaha manufaktur biasanya mempunyai 5 (lima) jenis persediaan", yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Baku dan Bahan Pelengkap Biaya yang ada di bahan baku (raw material) terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan hingga bahan tersebut dipakai dalam produksi. Bahan baku masih dapat digolongkan ke dalam bahan baku langsung dan bahan pelengkap. Bahan baku langsung adalah bahan-bahan yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk, misalnya bahan kayu untuk pembuatan lemari. Bahan baku pelengkap adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk, seperti minyak pelumas dan kertas amplas. Bahan tersebut secara fisik tidak terlihat dalam produk.
- b. Barang dalam pengolahan Barang dalam pengolahan (work in process) adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga dan biaya tidak langsung lainnya.
- c. Barang jadi Barang jadi (finished goods) adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Persediaan meliputi barang-barang yang ada dalam perusahaan, dalam perjalanan atau yang dititipkan kepada pihak lain. Barang-barang yang tidak dapat lagi dijual atau digunakan untuk produksi tidak digolongkan ke dalam persediaan. Persediaan semacam ini dimasukkan sebagai bagian aset lain-lain.

- d. Barang dalam perjalanan Barang dalam perjalanan (goods in transit) adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB Shipping Point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Apabila tidak diperhitungkan maka persediaan dan utang usaha akan terlalu rendah dicatat dalam neraca serta pembelian dan persediaan akhir akan terlalu rendah dicatat dalam laporan laba rugi.

e. Barang Konsinyasi

Barang konsinyasi (*consigned goods*) adalah barang yang telah diserahkan kepada *consignee* tetapi merupakan kepemilikan dari *consignor* dan dimasukkan dalam persediaan *consignor* sebesar harga beli atau biaya produksi. *Consigned goods* akan diungkapkan dalam catatan tersendiri. *Consignee* harus hati-hati agar tidak memasukkan setiap barang konsinyasi sebagai bagian dari persediaan.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) "Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset. Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada". Herjanto (2007:237) menjelaskan bahwa "jumlah persediaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya dana mengendap yang besar juga, meningkatnya biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar". Berdasarkan Martani et al (2012) "Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya". PSAK No. 14 (revisi 2008) mendefinisikan "persediaan sebagai aset yang: (i) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (ii) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; (iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa". "Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara

jumlah persediaan dengan total asset" (Richardson dan Lanis, 2007). Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan. PSAK No. 14 (revisi 2008) menjelaskan bahwa "biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya". "Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

2.7 Profitabilitas

Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa "profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki". Ghazali dan Chariri dalam Atarwaman (2011) menjelaskan "laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya". "Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). "Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan

bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan" (Atarwaman, 2011). Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa "pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak". "Semakin besar penghasilan yang

diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan" (Richardson dan Lanis, 2007). Menurut Rodriguez dan Arias (2012) "profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun". Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan Konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi Effective Tax Rate (ETR).

2.8 Penelitian Terdahulu

Dasar-dasar atau acuan yang berupa teori atau temuan melalui hasil penelitian sebelumnya adalah perihal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas di dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Variabel X Effective Tax Rate (ETR).

Penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) menggunakan Corporate ETR sebagai variabel dependen dan Direktur Independen, Investor Institusional, Ukuran perusahaan, Leverage, dan ROA sebagai variabel independennya. Mereka menggunakan The Multivariate Regression Models, Univariate tests sebagai alat analisisnya. Dimana hasilnya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara Corporate Governance dan Corporate ETR.

Penelitian terdahulu lain adalah yang dilakukan oleh Noor et al. (2010) yang menggunakan variabel dependennya adalah Corporate ETR, sedangkan untuk variabel independennya adalah sistem perpajakan

perusahaan dan karakter perusahaan. Noor ef. al. (2010) menggunakan Statistics and Univariate Analysis, Regression Results sebagai alat analisis statistik. Hasil yang didapat adalah menemukan hubungan yang positif antara corporate effective tax rate (CETR) dengan karakter perusahaan dan sistem pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chiao ef. al. (2012), variabel dependen yang digunakan adalah Effective Tax Rate, variabel Independen yang digunakan adalah Kepemilikan Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan dan Leverage. Kemudian Chiao ef. al. (2012) menggunakan Metode data panel dengan dua sisi sensoring. Hasilnya Kepemilikan saham oleh pemerintah dan kepemilikan aset tetap tidak ada memiliki pengaruh dengan tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan, ROA dan intensitas persediaan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Variabel Independen hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian yang dilakukan Haryadi (2012) juga mengangkat Effective Tax Rate sebagai variabel dependennya, sedangkan variabel independennya adalah ukuran perusahaan, hutang perusahaan, Intensitas Modal, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Komisaris Independen. Hasil penelitiannya adalah Intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Variabel leverage akan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), meneliti variabel dependen Effective Tax Rate dan variabel independennya adalah Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen. Hasil dan penemuan ini adalah Variabel size (ukuran perusahaan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR) dengan arah negatif. Variabel leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel profitability tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel capital intensitas ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel komisaris komisaris Independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR) dengan arah positif.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Amelia (2015) dengan menggunakan Variabel dependen Effective Tax Rate dan Variabel Independennya adalah Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen. Menggunakan Uji asumsi klasik, Regresi linear berganda sebagai alat analisis statistiknya. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel size (ukuran perusahaan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel Intensitas Aset Tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel Intensitas Persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR).

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengenai pengaruh terhadap tarif Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Terdapat beberapa variabel yang ingin diteliti oleh peneliti karena diindikasikan mempengaruhi Effective Tax Rate (ETR) diantaranya Karakteristik Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas aset tetap, Intensitas persediaan dalam hal ini menjadi variabel independen dan effective tax rate (ETR) yang akan menjadi variabel yang di pengaruhi atau dependen.

2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis (atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa) dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hubungan sebab akibat yang ada merupakan variabel-variabel yang diwujudkan dalam pernyataan.

2.10.1 Pengaruh Praktik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate

- Pengaruh Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate *Komisaris Independen adalah

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung" seperti yang dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana, (2006). "Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris dari manajemen" (Michelon dan Parbonetts, 2010). Komisaris Independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga komisaris Independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholder-nya. Bonazz dan Islam (2007) menyatakan bahwa "bukti empiris masa lalu telah menyepakati peran pengawasan yang baik dilakukan oleh dewan luar perusahaan dan direktur Independen terhadap kinerja manajerial dan perusahaan secara keseluruhan dimana para dewan luar dan direktur perusahaan mengawasi perusahaan agar beroperasi sesuai dengan jalurnya dan tidak bertentangan dengan hukum". Minnick dan Noga (2010) melihat "aspek dari sisi positif yang menyangkut pada nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan dorongan yang signifikan dari *bottom line performance*". Penelitian yang dilakukan oleh Sabh dan Noor (2012) menyimpulkan bahwa "komisaris Independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan". Komisaris Independen bersama dewan komisaris yang lain bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris Independen dilakukan agar tidak terjadi asimetris informasi antara manajemen perusahaan dengan para stakeholder. Menurut peneliti, kehadiran komisaris Independen dalam dewan komisaris

mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direktur, sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen untuk meminimalkan tingkat *effective tax rate* suatu perusahaan, sehingga mengarah sebagai berikut:

H1a: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Affective Tax Rate

b. Pengaruh Komite Audit terhadap Affective Tax Rate

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX 1.5 disebutkan bahwa "komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang di mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris Independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik". "Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan" (Foker, 1992) dalam Said et al (2009). Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. "Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan" (Mayangsari, 2003). Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetris informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Dikarenakan adanya implikasi dari pelaku pajak agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Menurut Char dan Liu (2010), jika nominal pajak yang

dibayarkan terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk meminimalis angka pajak tersebut dengan melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1b : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Affective Tax Rate

c. Pengaruh Investor Institusional terhadap Affective Tax Rate

Lim (2011) menjelaskan bahwa "aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari investor institusi akan membantu untuk meningkatkan efek penghindaran pajak dan kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dimana para pemegang saham yang lebih besar dan para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri". Wahab et al, (2008) telah melihat "peran investor institusional di Malaysia dimana mereka menunjukkan bahwa investor institusional bisa muncul bersamaan dengan tata kelola perusahaan sebagai dua agen pemantauan". Perusahaan dalam rangka mengurangi masalah keagenan dan untuk mencapai keuntungan *bottom line performance* yang lebih tinggi dan dapat menjamin investasi berkelanjutan maka pajak harus di turunkan melalui perencanaan pajak yang didorong oleh para investor institusional. Investor institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya setiap investor ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya Sehingga akan menyebabkan pembagian deviden yang cukup tinggi. Dalam pencapaian tersebut terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Investor institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat indikasi investor institusional mempunyai andil dalam penetapan kebijakan yang terkait tingkat pajak efektif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1c : Investor Institusional berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate

2.10.2 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Effective Tax Rate

"Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak" (Darmadi dan Zulaikha, 2013).

Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa "aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya". Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa "metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak". Lebih lanjut, Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa "perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai effective tax rate yang rendah". Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007) dan Noor et al. (2010) mendapatkan hasil bahwa "variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dari uraian diatas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H2: Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate

2.10.3 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Effective Tax Rate

"Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang" (Heryanto, 2007). PSAK No. 14 "mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya". Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalkan beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. "Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dari uraian diatas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H3 : Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate

2.10.4 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Effective Tax Rate

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan "bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam

tahun pajak". Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa "perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah".

Hubungan negatif ini mengindikasikan perusahaan yang semakin efisien dan mempunyai profit yang tinggi membayar beban pajak yang rendah. Alasan yang memungkinkan adalah bahwa profitabilitas perusahaan dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya untuk menurunkan tarif pajak efektifnya. Dari uraian diatas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengaruh dari Variabel Independen yakni Karakteristik Corporate Governance, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Profitabilitas terhadap Variabel Dependen Effective Tax Rate (ETR). Populasi penelitian ambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dan Listing sahamnya di BEI sejak tahun 2012-2016 agar supaya penelitian yang dilakukan dengan data dari tahun yang terbaru.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian dan petunjuk dalam mengetahui informasi tentang variabel yang akan diteliti untuk menganalisa data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Penelitian

"Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran" (Sekaran, 2017). Pada penelitian ini terdapat dua variabel,

yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Ada enam variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini yaitu praktik Corporate Governance, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan profitabilitas. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini hanya ada satu yaitu effective tax rate (ETR).

Berikut penjelasan masing-masing variabel:

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Effective tax rate (ETR). Effective tax rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan, Effective tax rate (ETR) semakin baik apabila nilai Effective tax rate (ETR) semakin rendah. Menurut Rodriguez dan Anas (2012) "Effective tax rate (ETR) dapat dihitung dan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dan tidak membedakan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan Effective tax rate (ETR) dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Semakin baik nilai Effective tax rate (ETR) ditandai dengan semakin rendahnya nilai Effective tax rate (ETR) perusahaan tersebut". Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemulihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. Effective tax rate (ETR) perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus yang digunakan Ardyansah dan Zulaikha (2014):

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam penghitungan tarif pajak efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan.

3.2.3 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.

Dalam penelitian ini variabel independen adalah Karakteristik Corporate Governance, intensitas aset

tetap, intensitas persediaan dan profitabilitas. Variabel Kontrol dalam Variabel Independen Karakteristik Corporate Governance terdiri dari: komisaris independen, komite audit dan investor institusional.

a. **Komisaris Independen** "Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan" (Surya dan Yustiavandana, 2006). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEI/07-2004 "setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman corporate governance". Variabel ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} \times 100\%$$

b. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan good corporate governance atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula, dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen et al. 2010).

c. Investor Institusional

"Investor institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain)" Djakman dan Machmud (2008). Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu pemegang saham institusi maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung

total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan institusi. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Proporsi Komisaris Independen = 100%

d. Profitabilitas (ROA)

"Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisien penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Penelitian menggunakan proxy rasio return on asset (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Variabel leverage diukur dengan rumusan return on asset (Hery, 2015)

ROA = Laba bersih / Total Aset

e. Intensitas Aset Tetap

"Definisi intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Penelitian ini menggunakan proxy intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan, sesuai dengan rumus yang digunakan Ardyansah dan Zulaikha (2014).

Intensitas Aset tetap = Total Aset Tetap / Total Aset

f. Intensitas Persediaan

"Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Variabel intensitas aset tetap menggunakan proxy rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan rumus yang digunakan Chiao et, al (2012):

Intensitas Persediaan = Total Persediaan / Total Aset

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

metode penelitian dengan cara memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, internet, jurnal dan beberapa perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang akan dipakai oleh peneliti adalah data sekunder dimana data yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara/pihak lain. "Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau data historis yang telah disusun rapi dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan" (Suglyona, 2012). Peneliti menggunakan pengumpulan data sekunder diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan yang bersangkutan, baik berasal dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), annual report, serta website Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel yaitu dengan teknik Purposive Sampling, dengan memilih berdasarkan pertimbangan (Judgement Sampling) yang merupakan bentuk pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Populasi yang akan dipilih oleh peneliti adalah sampel yang dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
2. Perusahaan Manufaktur yang termasuk dalam Sektor Industri Barang Konsumsi.
3. Perusahaan yang mendapatkan Laba selama 5 tahun berturut-turut, karena apabila perusahaan pada saat tahun tersebut merugi maka tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan atas Rugi tersebut.
4. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan Laporan Keuangan pada tahun 2012-2016 dengan lengkap dan telah dilakukan audit atas Laporan Keuangan tersebut, maksudnya lengkap adalah elemen variabel-variabel independen ditampilkan secara lengkap dalam tahun 2012-2016.
5. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan Laporan Keuangan dengan menggunakan mata

uang Rupiah, agar perusahaan yang terpilih dapat mewakili perusahaan manufaktur di Indonesia.

6. Data-data mengenai variabel yang akan diuji disajikan secara lengkap dalam Laporan Keuangan 2012-2016.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

"Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum" (Ghozali, 2013:19). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

3.4.2 Uji Pemilihan Regresi Data panel

Data Panel adalah sebuah data yang digunakan untuk melihat perilaku umum suatu variabel dari berbagai unit (individu) dan antar waktu (lintas individu dan lintas waktu). Kelebihan menggunakan data panel adalah kita dapat mendalami efek ekonomi yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan data lintas waktu (me series) maupun data lintas individu (cross section).

a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square)

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS) yang diterapkan dalam data yang berbentuk pool. Di dalam pengolahan data panel dengan metode kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS) dilanjutkan dengan Uji Asumsi klasik.

b. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)

Kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil biasa tersebut adalah asumsi intersep dan slope dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun antar waktu yang mungkin tidak beralasan. Generalisasi secara umum sering dilakukan adalah dengan

memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu. Di dalam pengolahan data panel dengan metode fixed effect tidak dilanjutkan dengan Uji Asumsi klasik.

c. Pendekatan Efek Acak (Random Effect)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Berkaitan dengan hal ini, dalam model data panel dikenal pendekatan ketiga yaitu model efek acak (random effect). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah, model efek acak sering juga disebut model komponen error (error component model). Dalam pemilihan model yang tepat pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Likelihood ratio test dan Hausman test.

a. Likelihood Ratio Test (Restricted F-test) atau Chow Test

Pada tahap awal pengujian /likelihood ratio dilakukan untuk mengetahui model mana yang paling baik digunakan dalam penelitian antara common effect model dan Fixed effect model. Hipotesa pengujian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Common Effect Model

H_a : Fixed Effect Model

Syarat dalam pengambilan keputusan yang diterima yaitu apabila probabilitas chi square lebih kecil dari alfa 0.05 maka H_0 ditolak sehingga H_a diterima, yang artinya model yang paling tepat digunakan adalah fixed effects dan sebaliknya jika Chi square lebih besar maka model yang digunakan adalah common effect.

b. Uji Hausman

Setelah melakukan pengujian likelihood ratio maka tahap selanjutnya dalam menentukan model yang

akan digunakan adalah dengan melakukan pengujian hausman. Hipotesa pengujian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ho: Random Effect Model

Ha: Fixed Effect Model

Syarat dalam pengambilan keputusan yang akan diterima dalam uji hausman yaitu apabila probabilitas chi square lebih kecil dari alfa 0.05 maka *Ho* ditolak sehingga *Hj* diterima, yang artinya model yang paling tepat digunakan adalah fixed effects dan sebaliknya jika chi square lebih besar maka model yang digunakan adalah random effect.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Jika pada pengujian likelihood ratio atau uji Chow *Ho* gagal ditolak atau keputusannya model yang terbaik adalah Common Effect, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis pengujian ini adalah sebagai berikut:

Ho: Common Effect Model

Ha: Random Effect Model

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian goodness-of-fit dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi berganda digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat, maka digunakan koefisien determinasi untuk menunjukkan proporsi variabilitas total pada variabel bebas yang dijelaskan pada model regresi. Koefisien determinasi (*R*) dapat dihitung untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.4.4 Uji F (Uji Serentak)

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), meneliti variabel dependen Effective Tax Rate dan variabel independennya adalah Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen. Hasil dan penemuan ini adalah Variabel size (ukuran perusahaan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR)

dengan arah negatif. Variabel leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel profitability tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel capital intensity ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel komisaris komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR) dengan arah positif.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Amelia (2015) dengan menggunakan Variabel dependen Effective Tax Rate dan Variabel Independennya adalah Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen. Menggunakan Uji asumsi klasik, Regresi linear berganda sebagai alat analisis statistiknya. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel size (ukuran perusahaan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel Intensitas Aset Tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel Intensitas Persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR).

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengenai pengaruh terhadap tarif Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Terdapat beberapa variabel yang ingin diteliti oleh peneliti karena diindikasikan mempengaruhi Effective Tax Rate (ETR) diantaranya Karakteristik Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas aset tetap, Intensitas persediaan dalam hal ini menjadi variabel independen dan effective tax rate (ETR) yang akan menjadi variabel yang di pengaruhi atau dependen.

2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis (atau ada pula yang menyebutnya dengan

Istilah hipotesa) dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hubungan sebab akibat yang ada merupakan variabel-variabel yang diwujudkan dalam pernyataan.

2.10.1 Pengaruh Praktik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate

a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate "Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung" seperti yang dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana, (2006). "Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris dari manajemen" (Michelon dan Parbonetts, 2010). Komisaris Independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga komisaris Independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholder-nya. Bonazz: dan Islam (2007) menyatakan bahwa "bukti empiris masa lalu telah menyepakati peran pengawasan yang baik dilakukan oleh dewan luar perusahaan dan direktur Independen terhadap kinerja manajerial dan perusahaan secara keseluruhan dimana para dewan luar dan direktur perusahaan mengawasi perusahaan agar beroperasi sesuai dengan jalurnya dan tidak bertentangan dengan hukum". Minnick dan Noga (2010) melihat "aspek dari sisi positif yang menyangkut pada nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan dorongan yang signifikan dari bottom line performance". Penelitian yang dilakukan oleh Sabh dan Noor (2012) menyimpulkan bahwa "komisaris Independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan". Komisaris Independen bersama dewan komisaris yang lain bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan namun tidak melanggar hukum termasuk

dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris Independen dilakukan agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para stakeholder. Menurut peneliti, kehadiran komisaris Independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direktur, sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen untuk meminimalkan tingkat effective tax rate suatu perusahaan, sehingga mengarah ke hipotesis pertama sebagai berikut:

H1a: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Affective Tax Rate

b. Pengaruh Komite Audit terhadap Affective Tax Rate

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX 1.5 disebutkan bahwa "komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang di mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari anggota komisaris Independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik". "Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan" (Foker, 1992) dalam Said et al (2009). Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. "Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan" (Mayangsari, 2003). Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah

berjalan. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otontas public (Sartori, 2010). Dikarenakan adanya implikasi dari pelaku pajak agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Menurut Char dan Liu (2010), jika nominal pajak yang dibayarkan terlalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untuk meminimalisir angka pajak tersebut dengan melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1b : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate

c. Pengaruh Investor Institusional terhadap Effective Tax Rate

Lim (2011) menjelaskan bahwa "aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari investor institusi akan membantu untuk meningkatkan efek penghindaran pajak dari kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dimana para pemegang saham yang lebih besar dan para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri". Wahab et al, (2008) telah melihat "peran investor institusional di Malaysia dimana mereka menunjukkan bahwa investor institusional bisa muncul bersamaan dengan tata kelola perusahaan sebagai dua agen pemantauan". Perusahaan dalam rangka mengurangi masalah keagenan dan untuk mencapai keuntungan bottom line performance yang lebih tinggi dan dapat menjamin investasi berkelanjutan maka pajak harus diturunkan melalui perencanaan pajak aktif yang didorong oleh para investor institusional. Investor institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya setiap investor ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya Sehingga

akan menyebabkan pembagian deviden yang cukup tinggi. Dalam pencapaian tersebut terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Investor institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat indikasi investor institusional mempunyai andil dalam penetapan kebijakan yang terkait tingkat pajak efektif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1c : Investor Institusional berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate

2.10.2 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Effective Tax Rate

"intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak" (Darmadi dan Zulaikha, 2013).

Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa "aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya". Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa "metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak". Lebih lanjut, Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa "perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi

cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai effective tax rate yang rendah", Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007) dan Noor et al. (2010) mendapatkan hasil bahwa "variabel Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Dari uraian diatas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H2: Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate

2.10.3 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Effective Tax Rate

"Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang" (Heryanto, 2007). PSAK No. 14 "mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya". Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. "Cara yang akan digunakan manajer adalah dengan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dari uraian diatas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H3 : Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap Effective Tax Rate

2.10.4 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Effective Tax Rate

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah.

Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan "bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak". Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa "perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah".

Hubungan negatif ini mengindikasikan perusahaan yang semakin efisien dan mempunyai profit yang tinggi membayar beban pajak yang rendah. Alasan yang memungkinkan adalah bahwa profitabilitas perusahaan dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya untuk menurunkan tarif pajak efektifnya. Dari uraian di atas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengaruh dari Variabel Independen yakni Karakteristik Corporate Governance, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Profitabilitas terhadap Variabel Dependen Effective Tax Rate (ETR). Populasi penelitian ambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dan Listing sahamnya di BEI sejak tahun 2012-2016 agar supaya penelitian yang dilakukan dengan data dari tahun yang terbaru.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian dan petunjuk dalam mengetahui informasi tentang variabel yang akan diteliti untuk menganalisa data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Variable Penelitian

"Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran" (Sekaran, 2017). Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Ada enam variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini yaitu praktik Corporate Governance, Intensitas aset tetap, Intensitas persediaan dan profitabilitas. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini hanya ada satu yaitu effective tax rate (ETR).

Berikut penjelasan masing-masing variabel:

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Effective tax rate (ETR). Effective tax rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan, Effective tax rate (ETR) semakin baik apabila nilai Effective tax rate (ETR) semakin rendah. Menurut Rodriguez dan Anas (2012) "Effective tax rate (ETR) dapat dihitung dan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dan sudah membedakan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan Effective tax rate (ETR) dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Semakin baik nilai Effective tax rate (ETR) ditandai dengan semakin rendahnya nilai Effective tax rate (ETR) perusahaan tersebut". Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak ini dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemulihan kebanyakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. Effective tax rate (ETR) perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus yang digunakan Ardyansah dan Zulaikha (2014):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam penghitungan tarif pajak efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan.

3.2.3 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.

Dalam penelitian ini variabel independen adalah Karakteristik Corporate Governance, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan profitabilitas. Variabel Kontrol dalam Variabel Independen Karakteristik Corporate Governance terdiri dari: komisaris independen, komite audit dan investor institusional.

a. Komisaris Independen "Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan" (Surya dan Yustiavandana, 2006). Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEI/07-2004 "setiap perusahaan yang telah menulis komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman corporate governance". Variabel ini diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

b. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan good corporate governance atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula, dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen et al. 2010).

c. Investor Institusional

"Investor institusional adalah kepemilikan saham

perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain)" Djakman dan Machmud (2008). Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu pemegang saham institusi maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan institusi. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

d. Profitabilitas (ROA)

"Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisien penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai" (Darmadi dan Zulakha, 2013). Penelitian ss menggunakan proxy rasio return on asset (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Variabel leverage diukur dengan rumusan return on asset (Hery, 2015)

$$\text{ROA} = \text{Laba bersih} / \text{Total Aset}$$

e. Intensitas Aset Tetap

"Definisi Intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Penelitian ini menggunakan proxy intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan, sesuai dengan rumus yang digunakan Ardiansah dan Zulaikha (2014).

$$\text{Intensitas Aset tetap} = \text{Total Aset Tetap} / \text{Total Aset}$$

f. Intensitas Persediaan

"Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan" (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Variabel intensitas aset tetap

menggunakan proxy rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan rumus yang digunakan Chiao et, al (2012):

$$\text{Intensitas Persediaan} = \text{Total Persediaan} / \text{Total Aset}$$

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, internet, jurnal dan beberapa perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang akan dipakai oleh peneliti adalah data sekunder dimana data yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara/pihak lain. "Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau data historis yang telah disusun rapi dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan" (Sugiyono, 2012). Peneliti menggunakan pengumpulan data sekunder diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan yang bersangkutan, baik berasal dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), annual report, serta website Bursa Efek Indonesia ds www.idx.co.id.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel yaitu dengan teknik Purposive Sampling, dengan memilih berdasarkan pertimbangan (Judgement Sampling) yang merupakan bentuk pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Populasi yang akan dipilih oleh peneliti adalah sampel yang dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar ds BEI tahun 2012-2016.
2. Perusahaan Manufaktur yang termasuk dalam Sektor Industri Barang Konsumsi.
3. Perusahaan yang mendapatkan Laba selama 5 tahun berturut-turut, karena apabila perusahaan

pada saat tahun tersebut merugi maka tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan atas Rugi tersebut.

4. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan Laporan Keuangan pada tahun 2012-2016 dengan lengkap dan telah dilakukan audit atas Laporan Keuangan tersebut, maksudnya lengkap adalah elemen variabel-variabel independen ditampilkan secara lengkap dalam tahun 2012-2016.
5. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan Laporan Keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah, agar perusahaan yang terpilih dapat mewakili perusahaan manufaktur di Indonesia.
6. Data-data mengenai variabel yang akan diteliti disajikan secara lengkap dalam Laporan Keuangan 2012-2016.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

"Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum" (Ghozali, 2013:19). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel.

3.4.2 Uji Pemilihan Regresi Data panel

Data Panel adalah sebuah data yang digunakan untuk melihat perilaku umum suatu variabel dari berbagai unit (individu) dan antar waktu (lintas individu dan lintas waktu). Kelebihan menggunakan data panel adalah kita dapat mendalami efek ekonomi yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan data lintas waktu maupun data lintas individu (cross section).

a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Square)

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS) yang diterapkan dalam data yang berbentuk pool. Di dalam pengolahan data panel dengan metode

kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS) dilanjutkan dengan Uji Asumsi klasik.

b. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)

Kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil biasa tersebut adalah asumsi intersep dan slope dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun antar waktu yang mungkin tidak beralasan. Generalisasi secara umum sering dilakukan adalah dengan memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu. Di dalam pengolahan data panel dengan metode fixed effect tidak dilanjutkan dengan Uji Asumsi klasik.

c. Pendekatan Efek Acak (Random Effect)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Berkaitan dengan hal ini, dalam model data panel dikenal pendekatan ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. Karena hal ini lah, model efek acak sering juga disebut model komponen error (*error component model*). Dalam pemilihan model yang tepat Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Likelihood ratio test dan Hausman test.

a. Likelihood Ratio Test (Restricted F-test) atau Chow Test

Pada tahap awal pengujian /likelihood ratio dilakukan untuk mengetahui model mana yang paling baik digunakan dalam penelitian antara common effect model dan Fixed effect model. Hipotesa pengujian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Common Effect Model

H_a : Fixed Effect Model

Syarat dalam pengambilan keputusan yang diterima

yaitu apabila probabilitas chi square lebih kecil dari alfa 0.05 maka H_0 ditolak sehingga H_1 diterima, yang artinya model yang paling tepat digunakan adalah fixed effects dan sebaliknya jika Chi square lebih besar maka model yang digunakan adalah common effect.

b. Uji Hausman

Setelah melakukan pengujian likelihood ratio maka tahap selanjutnya dalam menentukan model yang akan digunakan adalah dengan melakukan pengujian hausman. Hipotesa pengujian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Random Effect Model

H_a : Fixed Effect Model

Syarat dalam pengambilan keputusan yang akan diterima dalam uji hausman yaitu apabila probabilitas chi square lebih kecil dari alfa 0.05 maka H_0 ditolak sehingga H_1 diterima, yang artinya model yang paling tepat digunakan adalah fixed effects dan sebaliknya jika chi square lebih besar maka model yang digunakan adalah random effect.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Jika pada pengujian likelihood ratio atau uji Chow H_0 gagal ditolak atau keputusannya model yang terbaik adalah Common Effect, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis pengujianya adalah sebagai berikut:

H_0 : Common Effect Model

H_a : Random Effect Model

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian goodness-of-fit dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi berganda digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat, maka digunakan koefisien determinasi untuk menunjukkan proporsi variabilitas total pada variabel bebas yang dijelaskan pada model regresi. Koefisien determinasi (R^2) dapat dihitung untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.4.4 Uji F (Uji Serentak)

Merupakan global yang juga merupakan uji kelayakan model (goodness of fits model). Uji F ini membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel pada tingkat keyakinan tertentu. Uji F digunakan untuk menguji apakah paling tidak ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ Tidak ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$ Paling tidak ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.
- C. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F :
 1) Jika nilai probabilitas F lebih < 0.05 maka H_0 ditolak
 2) Jika nilai probabilitas F lebih > 0.05 maka H_0 gagal ditolak

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Regresi Panel

Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Panel dengan bantuan program Eview 9.0 Metode analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui koefisien regresi atau besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu komite independen, komite audit, investor institusional, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan kinerja (ROA) terhadap variabel tidak bebas, yaitu ETR. Adapun persamaan regresi panel yang dipergunakan untuk menganalisis variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \beta_0 + \beta_1 IND_{it} + \beta_2 BCA_{it} + \beta_3 IS_{it} + \beta_4 CI_{it} + \beta_5 II_{it} + \beta_6$$

Keterangan :

β_0	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_6$	: Koefisien Regresi
ETR	: Effective Tax Rate
IND	: Komite Independen
CA	: Komite Audit
IS	: Investor Institusional
CI	: Intensitas Aset Tetap
II	: Intensitas Persediaan
ROA	: Return on Assets

β_e : Error

1.1.2 Uji t (Hipotesis)

Uji t adalah pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen guna mengetahui seberapa besar. Berikut ini hipotesis dari uji t :

H_0 : Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen

H_a : Variabel independen memengaruhi variabel dependen

Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai prob-t < β 0.05 maka H_0 diterima. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai prob-t $\geq \beta$ 0.05 maka H_0 ditolak. Artinya bahwa tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data / Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengujian hipotesis, dimana penulis ingin menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel komisisar independen, Komite Audit, Investor Institusional, Intensitas Aset Tetap, Intensitas persediaan dan profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* sebagai variabel dependen. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 36 perusahaan untuk 5 tahun berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yang akan dijadikan sampel (N = 180) dalam penelitian ini.

Tabel 4.1

Rincian Perolehan Sampel Penelitian

Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor industri barang konsumsi	42
Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2012-2016 secara lengkap	(8)
Jumlah perusahaan yang masuk kriteria	36

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berikut ini adalah tabel sampel perusahaan manufaktur khususnya perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor industri barang konsumsi :

Tabel 4.2
Sampel Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1	ADES	PT. Akasha Wira Internasional Tbk
2	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3	ALTO	PT. Tri Baryan Tirta Tbk
4	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
6	DELTA	PT. Delta Djakarta Tbk
7	DVLA	PT. Darya-Vina Laboratoria Tbk
8	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
9	HMSP	PT. HM Sapoerna Tbk
10	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
11	INAF	PT. Indofood Tbk
12	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
13	KAEF	PT. Kimia Farma (persero) Tbk
14	KICI	PT. Kedaung Indah Cini Tbk
15	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
16	LMPI	PT. Langgeng Makmur Tbk
17	MSTO	PT. Martina Berto Tbk
18	MERK	PT. Merck Tbk
19	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
20	MRAT	PT. Mustika Ratu Tbk
21	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
22	PSON	PT. Presidia Aneka Niaga Tbk
23	PIYA	PT. Pyrdam Farma Tbk
24	RMDA	PT. Bontol Internasional Investama Tbk
25	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
26	SCPI	PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
27	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
28	SKBM	PT. Sekel Bumi Tbk
29	SKLT	PT. Sekel Laut Tbk
30	SCBB	PT. Teisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
31	STTP	PT. Siantar Top Tbk
32	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk
33	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk
34	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry Tbk
35	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
36	WIM	PT. Wismak Inti Makmur Tbk

Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan variabel-variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu karakteristik *corporate governance*, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Profitabilitas, serta variabel Dependennya adalah *Effective Tax Rate (ETR)*. Variabel-variabel tersebut diuji secara nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian statistik deskriptif atas variabel-variabel tersebut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ETR	IND	CA	IS	CI	II	ROA
Mean	19.07750	37.74471	3.072222	52.67007	50.24822	22.54209	10.14952
Median	25.15146	33.33333	3.000000	56.73843	44.11298	18.83179	8.244204
Maximum	579.6300	83.33333	5.000000	99.76997	106.5626	84.20190	43.16678
Minimum	-2.604047	0.000000	2.000000	0.000000	5.594078	1.177382	-2.080423
Std. Dev.	53.55315	12.61725	0.461120	36.37890	20.31696	14.46259	11.80190
Skewness	5.469167	0.892363	1.296178	-0.346680	0.638234	1.262061	0.888217
Kurtosis	71.92573	7.342489	8.356104	1.615867	2.674578	3.958854	3.886193
Jarque-Bera	36528.02	165.3184	265.5612	17.95354	13.01453	54.68100	29.55793
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000126	0.001493	0.000000	0.000000
Sum	3433.951	6794.048	553.0000	9480.613	9044.679	4057.577	1826.913
Sum Sq. Dev.	513361.3	2849.88	38.06111	236893.0	73887.44	37440.80	24931.99
Observations	180	180	180	180	180	180	180
Cross Sections	36	36	36	36	36	36	36

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel komisaris Independen memiliki mean sebesar 37.74471 dengan standar deviasi 12.61725 dan median 33.33333, komisaris independen dalam penelitian ini banyak karena nilai mean di atas nilai median. Kemudian untuk variabel Komite Audit memiliki mean 3.000000, variabel komite audit dapat dilihat tidak terlalu banyak walaupun nilai mean masih berada di atas median.

Untuk variabel Investor Institusional memiliki mean sebesar 52.67007 dengan standar deviasi

sebesar 36.37890 dan median sebesar 56.73843, dalam penelitian ini untuk variabel Investor Institusional sedikit karena dapat dilihat nilainya lebih sedikit dari median. Variabel Intensitas Aset Tetap memiliki mean 50.24822 dengan standar deviasi sebesar 20.31696 dan median 44.11298, dengan demikian dapat dilihat bahwa Intensitas aset tetap terhitung banyak dikarenakan nilainya lebih besar daripada nilai median.

Variabel Intensitas Persediaan di dalam penelitian ini memiliki nilai mean 22.54209 dengan nilai standar deviasi 14.46259 dan nilai median 18.83179, dengan demikian dapat dilihat bahwa Intensitas Persediaan terhitung banyak dikarenakan nilainya di atas nilai median. Untuk variabel profitabilitas di dalam penelitian ini memiliki nilai mean 10.14952 dengan nilai standar deviasi sebesar 8.244204 dan nilai median sebesar 8.244204, dengan demikian dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas terhitung banyak dikarenakan nilainya berada di atas nilai median.

1.1.2 Uji Pemilihan Regresi Data panel

Penelitian melakukan pengolahan data menggunakan Uji pemilihan regresi data panel dengan bantuan software *eviews 9.0*. Pemodelan dengan menggunakan Regresi Data Panel menggunakan 3 pendekatan alternative metode dalam pengolahannya.

Pendekatan tersebut adalah The Pooled OLS method, Metode Fixed Effect dan Metode Random Effect. Berikut merupakan interpretasi dari pemilihan model yang diterapkan terhadap model regresi pertama dalam penelitian ini dengan variabel dependen *Effective Tax rate (ETR)*. Pengujian ini dilakukan dengan metode Likelihood ratio test dan Hausman test. Berikut adalah hasil dari masing-masing pengujian:

a. Likelihood Ratle Test (Restricted F-test) atau Chow Test

Pada tahap awal pengujian likelihood ratio dilakukan untuk mengetahui model mana yang paling baik digunakan dalam penelitian antara common effect model dan fixed effect model. Hipotesa pengujian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ho: Common Effect Model

Ha: Fixed Effect Model

Syarat dalam pengambilan keputusan yang diterima yaitu apabila probabilitas chi square lebih kecil dari alfa 0.05 maka H_0 ditolak sehingga H_a diterima, yang artinya model yang paling tepat digunakan adalah fixed effects dan sebaliknya jika chi square lebih besar maka model yang digunakan adalah common effect. Berikut ini adalah hasil pengujian Chow Test:

Tabel 4.4
Hasil Chow Test

Variabel Dependen	Chi-Square	Prob	Keputusan	Keterangan
ETR	69.557064	0.0005	Ho Ditolak	Fixed effect

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9.0

Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel di atas, didapat nilai probabilitas dari Chi-Square lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak atau antara common effect model dan fixed effect model, model yang terbaik adalah fixed effect model. Oleh karena itu, dilakukan pengujian lanjutan dengan menggunakan Uji Hausman, yaitu untuk menentukan model yang terbaik antara fixed effect model dan random effect model.

b. Uji Hausman

Setelah melakukan pengujian likelihood ratio maka tahap selanjutnya dalam menentukan model yang akan digunakan adalah dengan melakukan pengujian hausman. Hipotesa pengujian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ho: Random Effect Model

Ha: Fixed Effect Model

Syarat dalam pengambilan keputusan yang akan diterima dalam uji hausman yaitu apabila probabilitas chi square lebih kecil dari alfa 0.05 maka

H_0 ditolak sehingga H_a diterima, yang artinya model yang paling tepat digunakan adalah fixed (ffecis dan sebaliknya jika chi square lebih besar maka model yang digunakan adalah random effect. Berikut ini adalah hasil pengujian Test Hausman:

Tabel 4.5
Hasil Hausman Test

Variabel Dependen	Chi-Square	Prob	Keputusan	Keterangan
ETR	12.831318	0.0458	Ho Ditolak	Fixed Effect

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9.0

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel di atas, didapat nilai probabilitas dari Chi-Square lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 ditolak atau antara random effect model dan fixed effect model, model yang terbaik adalah fixed effect model.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Jika pada pengujian likelihood ratio atau uji Chow H_0 gagal ditolak atau keputusannya model yang terbaik adalah Common Effect, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

Ho: Common Effect Model

Ha: Random Effect Model

Hasil uji Chow dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk ketiga model, yang terbaik adalah fixed effect model. Oleh karena itu, uji LM tidak perlu dilakukan.

1.1.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi berganda digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat, maka digunakan koefisien determinasi untuk menunjukkan proporsi variabilitas total pada variabel bebas yang dijelaskan pada model regresi. Koefisien determinasi (R^2) dapat dihitung untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel dependen	R-Squared	Adjust R-Squared
ETR	0,3618	0,1722

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9.0

Tabel di atas adalah hasil uji koefisien determinasi untuk model persamaan dengan menggunakan enam variabel independen, yaitu IND, CA, IS, CI, II dan ROA. Berdasarkan hasil pengujian, didapat nilai Adjusted R² sebesar 0,1722 artinya variasi variabel independen (IND, CA, IS, CI, II dan ROA) mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen price volatility sebesar 17,22 persen.

4.2.4 Uji F (Uji Serentak)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian, dengan kriteria, jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan data nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengolahan data nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini adalah tabel hasil Uji F untuk ketiga model:

Tabel 4.7

Hasil Uji F

Variabel Dependen	F-Statistik	Prob	Keputusan
ETR	1,908081	0,003029	Ho Ditolak

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9.0

Berdasarkan hasil uji F di atas, didapat nilai probabilitas sebesar 0,030 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak. Dengan demikian, paling tidak dari enam variabel independen, yaitu IND, CA, IS, CI, II dan ROA, mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu ETR. Oleh karena itu, persamaan regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

4.2.5 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Panel dengan bantuan program Eview 9.0 Metode analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui koefisien regresi atau besarnya pengaruh variabel independen, yaitu komisaris independen, komite audit, investor institusional, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan kinerja (ROA) terhadap variabel dependen, yaitu ETR. Berikut tabel hasil regresi variabel independen terhadap variabel dependen :

Tabel 4.8

Hasil Uji Hipotesis

Variabel Dependen ETR ?				
Variabel	Tanda Yang diharapkan	Koefisien	Prob	Kesimpulan
C		114,6776	0,1451	
IND	-	0,123206	0,4246	H1a Ditolak
CA	-	-1,408664	0,4551	H1b Ditolak
IS	-	-0,19437	0,4038	H1c Ditolak
CI	-	-1,622502	0,0012	H2 Diterima
II	-	0,421046	0,3687	H3 Ditolak
ROA	+	-1,34477	0,0865	H4 Ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah

a. Komisaris Independen dan Effective Tax rate

IND memiliki nilai koefisien sebesar 0,123206 dan nilai signifikansi sebesar 0,4246 > 0,05 sehingga H1a ditolak yang berarti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Effective tax rate. Namun, ditemukan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi komisaris independen, pula effective tax rate.

b. Komite Audit dan Affective Tax rate

CA memiliki nilai koefisien sebesar -1,408664 dengan nilai signifikan sebesar 0,4551 > 0,05 sehingga H1b ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh komite audit terhadap effective tax rate

c. Investor Institusional dan Effective Tax Rate

IS memiliki nilai koefisien sebesar -0,194370 dengan

nilai signifikan sebesar $0,4038 > 0,05$ sehingga H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh investor institusional terhadap effective tax rate.

d. Intensitas Aset Tetap dan Effective Tax Rate

CI memiliki nilai koefisien sebesar -1,622502 dan nilai signifikansi sebesar $0,0012 < 0,05$ sehingga H_2 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif intensitas aset tetap terhadap Effective tax rate. Semakin tinggi aset tetap perusahaan, semakin rendah pajak perusahaan.

e. Intensitas Persediaan dan Effective Tax Rate

II memiliki nilai koefisien sebesar 0,421046 dan nilai signifikansi sebesar $0,3687 > 0,05$ sehingga H_3 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas persediaan terhadap Effective tax rate.

f. Profitabilitas (ROA) dan Effective Tax Rate

ROA memiliki nilai koefisien sebesar -1,344770 dan nilai signifikansi sebesar $0,0865 > 0,05$ sehingga H_4 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap effective tax rate.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen (IND) tidak memiliki pengaruh terhadap Effective tax rate. Namun ditemukan adanya kecenderungan bahwa semakin banyak yang menduduki jabatan komisaris independen, semakin tinggi pula Effective Tax Rate.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Vicky Amelia (2015) dan Hanum Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa "komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR perusahaan". Hasil ini menunjukkan bahwa "komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris tidak melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan" sesuai

dengan pernyataan Antonia (2008). Sabli dan Noor (2012) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai latar belakang kegiatan bisnis perusahaan dapat mengakibatkan kegagalan dalam merumuskan strategi perusahaan yang efektif termasuk dalam strategi yang berhubungan dengan perpajakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012), dimana hasilnya menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Proporsi yang lebih banyak dalam dewan komisaris independen tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan pemerintah akan berjalan dengan efektif dan baik sesuai dengan keinginan manajemen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan "komisaris independen hanya bisa mengawasi kinerja manajemen namun yang mengambil keputusan tetaplah manajemen itu sendiri, wewenang komisaris independen tidak bisa secara langsung menetapkan kebijakan mengenai besaran effective tax rate" (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah dan Zulaikha (2014) yang menemukan komisaris independen memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap ETR dengan arah positif.

4.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh komite audit terhadap effective tax rate. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marita C. (2015) dan penelitian yang diperoleh oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR). "BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus diisi oleh 3 orang staff, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI" (Pohan, 2008). Jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam meminimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Komite audit

berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003), Sriwedari (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang diperoleh oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR).

4.3.3 Pengaruh Investor Institusional terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh investor institusional terhadap effective tax rate. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) Meneliti mengenai tax planning and corporate governance dengan hasil penelitian dengan hasil penelitian investor institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Hanum dan Zulaikha (2013) juga meneliti tentang pengaruh karakteristik corporate governance terhadap effective tax rate dengan hasil bahwa investor institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate (ETR).

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Mahenthiran dan Kasipalai (2012) hasil penelitiannya menemukan bahwa adanya hubungan signifikan investor institusional terhadap perencanaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan institusi akan mempengaruhi perencanaan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga hasil perencanaan pajak tersebut akan menentukan besaran tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan.

4.3.4 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara negatif terhadap Effective tax rate. Memiliki arah yang positif dan berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis masa manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak seperti kendaraan yang dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaannya dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50% saja. Adanya perlakuan terhadap biaya penyusutan aset tetap dapat mempengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Delgado et al., (2014), Gupta dan Newberry (2007) dan Thomas (2011) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap Effective Tax rate (ETR). Sedangkan penelitian terdahulu yang tidak sejalan dengan penelitian ini telah dikemukakan oleh Chiao et al., (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap tidak ada memiliki pengaruh dengan effective tax rate, juga penelitian yang dilakukan oleh Ardiansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa capital intensity ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate.

4.3.5 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas Persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Effective Tax Rate. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tanoto, Tiffany dan Gatot Soepriyanto (2013) yang menyatakan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR perusahaan. Variabel intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap effective tax rate dimana sedikit banyaknya persediaan yang dimiliki perusahaan, bukan merupakan faktor untuk menentukan besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hasil

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor et. al, hal ini terjadi karena biasanya dalam Undang-Undang perpajakan tidak memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang memiliki jumlah persediaan barang dagang yang besar.

Tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor et al., (2010) dan Chiao et al., (2012) yang mendapatkan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap effective tax rate.

4.3.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap Effective Tax Rate

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Effective Tax Rate, hasil ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang melebihi 5%.

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa penelitian lain yang memiliki kesamaan yaitu salah satunya Ardyansyah dan Zulaikha (2014) yang menghasilkan bahwa hipotesis profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate dimana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak, contohnya pendapatan dividen dengan tingkat kepemilikan 25% atau lebih dan pendapatan operasi lainnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Noor (2010) juga menemukan hubungan yang negative antara profitabilitas dengan Effective Tax Rate.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen (IND) tidak berpengaruh terhadap

effective Tax Rate. Namun ditemukan adanya kecenderungan bahwa semakin banyak yang menduduki jabatan komisaris independen, semakin tinggi pula Effective Tax Rate. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Vicky Amelia (2015) dan Hanum Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa "komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap effective Tax Rate perusahaan"

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit (CA) tidak berpengaruh terhadap effective Tax Rate. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marita C. (2015) dan penelitian yang diperoleh oleh Hanum dan Zulaikha (2013).
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor institusional (II) tidak berpengaruh terhadap Effective Tax Rate. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marita C. (2015) dan penelitian yang diperoleh oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR).
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas Aset Tetap berpengaruh secara negative terhadap Effective Tax Rate. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Delgado et al., (2014), Gupta dan Newberry (2007) dan Thomas (2011) yang menentukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR).
5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Effective Tax Rate. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tanoto, Tiffany dan Gatot Soepriyanto (2013) yang menyatakan bahwa *Inventory intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR perusahaan.
6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap effective Tax Rate, dengan demikian hipotesis dari penelitian variabel ditolak, hasil ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang melebihi 5%. Beberapa penelitian lain yang

memiliki kesamaan yaitu salah satunya Ardyansyah dan Zulaikha (2014) yang menghasilkan bahwa hipotesis profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* dimana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengalami kondisi-kondisi yang menyebabkan hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan beberapa factor keterbatasan diantaranya yaitu :

1. Variabel penelitian yang dipilih tidak banyak perusahaan yang mengungkapkan.
2. Perbedaan peraturan di Indonesia terkait dengan *Corporate Governance* dengan di luar negeri sehingga beberapa variabel seperti *CEO duality*, *family lwnership* sulit diaplikasikan di Indonesia.

5.3 Implikasi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perihal *Effective Tax Rate* (ETR). Hal-hal yang mungkin dapat menjadi pertimbangan dan masukan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Pada dasarnya ETR merupakan perbandingan antara kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan perpajakan, dengan laba akuntansi berdasar pada standar akuntansi. ETR dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Efektif dan tidaknya kewajiban perpajakan sebuah perusahaan relative terhadap ETR. Oleh karena itu untuk mengetahui factor apa saja yang berpengaruh terhadap ETR merupakan hal penting dan perlu diperhatikan dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi ETR yaitu Karakteristik *Corporate Governance*, Intensitas Aset Tetap & persediaan, serta profitabilitas. Dan masih banyak factor lain yang dapat mempengaruhi

effective Tax Rate (ETR).

2. Bagi perancang kebijakan dan peraturan perpajakan, kiranya dapat memberlakukan peraturan yang dapat tetap menjaga tingkat kepatuhan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Dirjen pajak diharapkan dapat lebih peka terhadap kesulitan wajib pajak badan dalam menentukan *effective tax rate (ETR)* bagi perusahaannya agar nilainya tidak memberatkan. Diharapkan peraturan dan kebijakan yang ditentukan bagi wajib pajak badan tidak terlalu memberatkan perusahaan dalam membayar pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai *effective tax rate (ETR)* yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat memperhatikan beberapa hal berikut ini :
 - Memperbanyak sampel penelitian sehingga dapat lebih mengetahui realitas yang terjadi di perusahaan mengenai praktek penghindaran pajak. Selain itu, semakin besar sampel penelitian, maka tingkat generalisasinya semakin tinggi, artinya hasil penelitian tersebut mencerminkan secara keseluruhan dari populasi yang diteliti.
 - Memilih populasi yang beda dari penelitian ini untuk membandingkan variabel-variabel yang diteliti kali ini apakah akan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di sector usaha lainnya.
 - Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel dengan penelitian. Salah satu variabel yang disarankan adalah *size* sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardyansyah dan Zulaikha (2014) yang menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate (ETR)*. Selain itu variabel *leverage* yang menghasilkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Kemudian variabel hutang perusahaan yang dilakukan juga penelitiannya oleh Noor et al (2008) dengan hasil Hutang perusahaan berpengaruh negative terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1 : Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variable	Analisis Statistik	Hasil
1	Sabli dan Noor (2012)	Corporate ETR (X), Proportion Of Independent Directors (Y), Institutional Investor (Y), aAnd Firm Size (Control), Leverage Ratio, Return On Asset (ROA) (Control) And Capital Intensity Ratio (Control)	The multivariate regression models; univariate tests	Menentukan pengaruh yang reaktif dan tidak signifikan antara corporate governance dan corporate effective tax rate (CETR)
2	Hajira dan Ghazempoor (2012)	Economic Value Added (X), Institutional Ownership (Y), Large Shareholder (Y), Managerial Shareholder (Y)	Descriptive Statistic, Multi Variable Regression	Institutional Ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap economic value added, large shareholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap economic value added, managerial shareholder tidak signifikan berpengaruh positif dengan economic value added.
3	Noor et al (2010)	Corporate Etr (X), Tax System (Y) And The Characteristic Of Companies (Y)	Descriptive Statistic And Univariate Analysis, Regression Result	Menentukan hubungan yang positif antara corporate effective tax rate (CETR) dengan karakter perusahaan dan system pajak.
4	Sari dan Martani (2010)	Tax Aggressive Actions (X), Corporate Governance (Y), Family Ownership (Y)	Descriptive Analysis, Anova Analysis, Regression Plane Data Model	Hasil penelitian menjelaskan kepemilikan keluarga cenderung lebih agresif dalam pajak dari perusahaan nonkeluarga, dan praktik tata kelola perusahaan secara negative mempengaruhi pajak agresif.
5	Minnick dan noga (2010)	Tax Management (X), Increase Pay Performance (X), External Governance (X)	Multivariate Analysis, Hansen Test Of Exogeneity	Kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan memotivasi untuk melakukan tax management.
6	Wulandari (2006)	Kinerja Perusahaan (X), Dewan Direksi (Y), Komisaris Independen (Y), Debt To Equity (Y), Institutional Ownership (Y)	Uji asumsi klasik, regresi linear berganda	Dewan direksi tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, debt to equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, institutional ownership tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
7	Chiao et al (2012)	1. Variabel Dependen : Effective Tax Rate 2. Variabel Independen : Kepemilikan Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan Dan Leverage		Kepemilikan saham oleh pemerintah dan kepemilikan aset tetap tidak ada memiliki pengaruh dengan tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan, ROA dan intensitas persediaan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Variable independen hutang perusahaan berpengaruh negative terhadap tarif pajak efektif.
8	Haryadi (2012)	1. Variabel Dependen : Tarif Pajak Efektif 2. Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Hutang Perusahaan	1. variabel independen : intensitas modal, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan komisaris independen	Intensitas modal dan ukura perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Variabel leverage akan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif
9	Ardiansah dan zulakha (2014)	1. Variabel Dependen : Effective Tax Rate 2. Variabel Independen : Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen		Variabel size (ukuran perusahaan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR) dengan arah negative variabel leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel capital intensity ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel komisaris komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR) dengan arah positif
10	Amelia (2015)	1. Variabel Dependen : Effective Tax Rate 2. Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, intensitas Persediaan Dan Komisaris Independen	Uji asumsi klasik, regresi linear berganda	Variabel size (ukuran perusahaan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap effective tax rate (ETR). Variabel intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax rate (ETR). Variabel Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Effective tax rate (ETR)

Lampiran 2 : Hasil Uji Common Effect

Dependent Variabel: ETR?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/24/18 Time: 16:18

Sample: 2012 2016

Included observation: 5

Cross-sections include: 36

Total pool (balanced) observations: 180

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.628330	29.85166	0.222042	0.8245
IND?	-0.429707	0.338810	-1.268281	0.2064
CA?	13.39986	6.772519	1.527544	0.1285
IS?	-0.219080	0.110485	-1.982903	0.0490
CI?	-0.267504	0.204764	-1.306399	0.1932
II?	0.453602	0.285114	1.590851	0.1134
ROA?	0.222317	0.363469	0.611655	0.5416
R-squared	0.060744	Mean dependent var	19.07750	
Adjusted R-squared	0.028168	S.D. dependent var	53.55315	
S.E. of regression	52.79351	Akaike info criterion	10.80877	
Sum squared resid	482177.8	Schwarz criterion	10.93294	
Log likelihood	-965.7890	Hannan-Quinn criter.	10.85911	
F-statistic	1.854712	Durbin-Watson stat	1.951597	
Prob(F-statistic)	0.089448			

Lampiran 3 : Hasil Uji Fixed Effect

Dependent Variable: ETR?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/24/18 Time: 16:19

Sample: 2012 2016

Include observations: 5

Cross-sections included: 36

Total pool ((balanced) observations: 180

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	114.6776	78.28917	1.465170	0.1451
IND?	0.1223206	0.647072	0.190406	0.8493
CA?	-1.468664	12.46595	-0.113001	0.9102
IS?	-0.194370	0.797214	-0.243812	0.8077
CI?	-1.622502	0.527153	-3.077858	0.0025
II?	0.421046	1.253055	0.338016	0.7374
ROA?	-1.344770	0.881940	-1.389503	0.1731
Fixed effect (Cross)				

_ADES-C	23.80460			
_AISA-C	-20.66523			
_ALTO-C	-30.15100			
_BUDI-C	67.64338			
_CEKA-C	-28.84006			
_DLTA-C	15.43132			
_DVLA-C	-1.008442			
_GORM-C	-8.948033			
_HMSP-C	-7.270366			
_ICBP-C	26.26814			
_INAF-C	-20.83043			
_INDF-C	-2.058314			
_KAEF-C	-27.64351			
_KICI-C	84.22856			
_KLBF-C	0.644044			
_LMPL-C	27.82362			
_MBTO-C	-82.50566			
_MERK-C	-15.60379			
_MLBI-C	107.4954			
_MRAT-C	-52.86329			
_MYOR-C	-31.20964			
_PSDN-C	-48.12290			
_PYFA-C	67.46921			
_RMBM-C	-67.58738			
_ROTI-C	-16.37793			
_SCPI-C	-63.95021			
_SIDO-C	-14.42591			
_SKBM-C	-5.111514			
_SILT-C	26.53255			
_SQBB-C	30.65046			
_STTP-C	48.35749			
_TOD-C	42.66702			
_TSPC-C	-56.88724			
_ULTJ-C	29.39771			
_UNVR-C	39.33358			
_WIM-C	-35.30527			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.361795	Mean dependent var	19.07750
Adjusted R-squared	0.172183	S.D. dependent var	53.55315
S.E. of regression	48.72500	Akaike info criterion	10.81123
Sum squared resid	327630.0	Schwarz criterion	11.55625
Log likelihood	-931.0104	Hannan-Quinn criter.	11.11330
F-statistic	1.908081	Durbin-Watson stat	2.691225
Prob(F-statistic)	0.003029		

Lampiran 4 : Hasil Ujian *Random Effect*

Dependen Variabel: ETR?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effect)

Date: 03/24/18 Time: 16:19

Sample: 2012 2016

Included observation: 5

Cross-sections include: 36

Total pool (balanced) observations: 180

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.37831	33.10833	0.615504	0.5390
IND?	-0.265115	0.376248	-0.757786	0.4496
CA?	10.11060	9.216316	1.097032	0.2742
IS?	-0.210301	0.133070	-1.580386	0.1158
CI?	-0.391643	0.235656	-1.661924	0.0993
LI?	0.372695	0.337247	1.105111	0.2706
ROA?	0.074228	0.418402	0.177409	0.8594

Random Effect (Cross)

_ADES-C	-4.335548			
_AISA-C	-2.374096			
_ALTO-C	-3.148455			
_BUD-C	14.03593			
_CEKA-C	-0.645938			
_DLTA-C	0.675307			
_DVLA-C	2.874338			
_GGRM-C	-0.418096			

_HMSP-C	-3.768256			
_ICBP-C	17.21263			
_INAF-C	-3.768256			
_INDF-C	4.605653			
_KAEF-C	-6.280894			
_KICI-C	42.00987			
_KLBFC	0.615617			
_LMPI-C	8.708798			
_MBTO-C	-20.48856			
_MERV-C	-0.118015			
_MLBI-C	13.63423			
_MRAT-C	-1.865293			
_MYOR-C	-14.19549			
_PSON-C	-23.40831			
_PYFA-C	10.27431			
_RMBA-C	-8.503254			
_ROTI-C	-15.54248			
_SCPI-C	-10.16007			
_SIDO-C	-3.867663			
_SKBM-C	5.340487			
_SKLT-C	10.08978			
_SQBB-C	5.584080			
_STTP-C	6.692684			
_TOD-C	-0.271642			
_TSPC-C	-14.06890			
_ULTA-C	1.588903			
_UNVR-C	0.944339			
_WIM-C	-7.452520			

